

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, maka penyusunan Perubahan Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 dan bersifat indikatif untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

Demikian penyusunan Perubahan RENSTRA ini dan diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalisir dampak dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Maumere, Februari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sikka,



THOMAS PETRUS LAMENG, ST

Pembina Utama Muda
NIP. 19630629 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS.....	7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2 Sumber Daya Dinas	14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas.....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	28
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra K/L.....	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	14
Table 2.2	Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
Tabel 2.3	Data ASN Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan	15
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana Kantor	16
Tabel 2.5	Data Kendaraan Ringan dan Kendaraan Berat	17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.....	19
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.....	23
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah	30
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.....	33
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Palayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Sasaran Kementerian PUPR	38
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Palayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian tujuan dan arah kebijakan RTRW Kabupaten Sikka	41
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Palayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian tujuan dan arah kebijakan KLHS Kabupaten Sikka.....	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.....	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.....	58
Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.....	62
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sikka..... 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra -PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang terdiri dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kabupaten Sikka, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun fungsi dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah yaitu menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan kegiatan, memudahkan melakukan pengawasan terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, meminimalisir kesalahan atau deviasi yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Tata cara penyusunan Perubahan Renstra dimulai dari proses persiapan penyusunan perubahan Renstra yang meliputi pembentukan tim penyusun; orientasi mengenai penyusunan perubahan Renstra; penyusunan agenda kerja tim; dan persiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan awal Perubahan Renstra, penyusunan rancangan Perubahan Renstra, forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Perubahan Renstra.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang dihasilkan harus mempunyai keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Perubahan Renstra yang disusun menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka sehingga menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan hal tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka sebagai sebuah perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Disamping itu Pandemi COVID-19 sangat berdampak hampir pada semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagai akibatnya Pemerintah membuat kebijakan baru dengan adanya sistem sosial baru atau *social distancing* maupun *physical distancing* dan ditindaklanjuti dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

- Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005–2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
 24. Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 25. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah 2018 – 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna

mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang lebih terukur kedalam tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD.
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.
- c. Merumuskan rencana kerangka pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA

Berisi gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIKKA

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penutup dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Sumber Daya Air
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
- d. Bidang Bina Marga
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Cipta Karya
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan PLP
 3. Seksi Penataan Bangunan
- f. Bidang Tata Ruang
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang
 2. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 3. Seksi Pemanfaatan Ruang
- g. Bidang Jasa Konstruksi
 1. Seksi Pengaturan

2. Seksi Pemberdayaan

3. Seksi Pengawasan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- e. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;
- f. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- h. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah;
- i. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
- j. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai dalam Daerah;
- k. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah dan penataan bangunan dan lingkungannya dalam Daerah;
- l. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah;
- m. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- o. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- p. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;

- q. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di Daerah;
- r. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di Daerah;
- s. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di Daerah;
- t. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di Daerah;
- u. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di Daerah;
- v. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di Daerah;
- w. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang Daerah;
- x. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis Daerah;
- y. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis Daerah;
- z. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada kabupaten dan masyarakat;
- aa. penyiapan bahan kerjasama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasian kerjasama penataan ruang antarkabupaten;
- bb. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang kepala bidang dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku urusan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/ pengembangan sumber daya air;
- e. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- f. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- g. pengelolaan sistem hidrologi;
- h. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- j. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala bidang dan mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan bidang bina marga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program;
- b. perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan koordinasi program dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;

- e. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- h. pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, peralatan, pengujian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertugas menyelenggarakan infrastruktur bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah dan sistem drainase lintas daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Cipta Karya melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
- c. penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah;
- d. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, perencanaan dan pemanfaatan ruang pada bidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah;
- b. penyiapan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis daerah;
- c. pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis daerah;
- d. pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pembinaan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

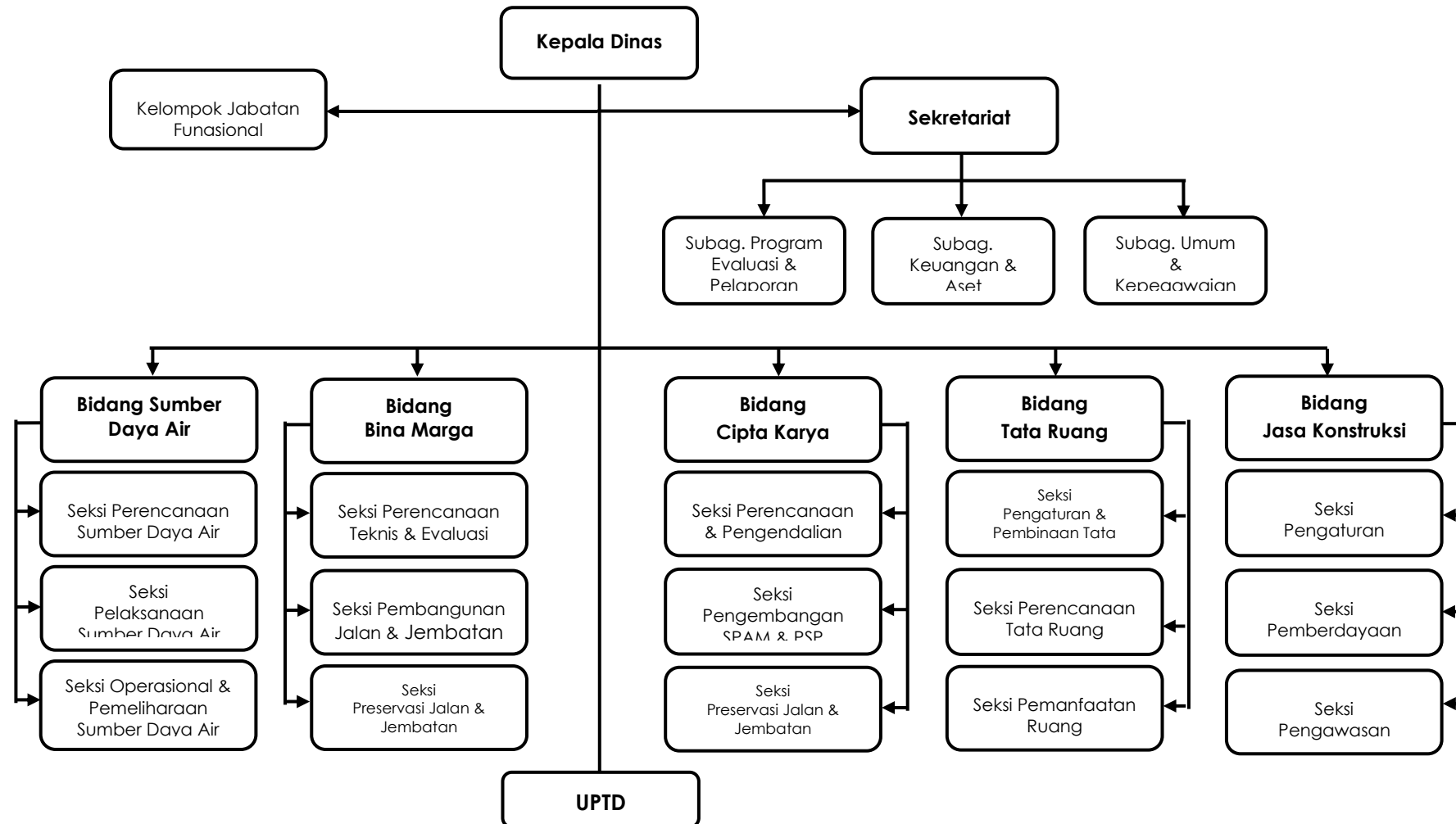
- a. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;

- b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- d. pengembangan dan peningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- g. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah kabupaten;
- h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah kabupaten;
- i. pelaksanaan pengujian mutu konstruksi dan peralatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sebagaimana Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, maka Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka



2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 30 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 25 jabatan struktural terdiri dari 1 jabatan eselon II/b, 1 jabatan eselon III/a, 5 jabatan eselon III/b dan 18 jabatan eselon IV/a, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 46 orang dengan total pegawai sebanyak 76 orang terdiri dari PNS sebanyak 56 orang dan tenaga Honor sebanyak 20 orang. Untuk melihat sebaran Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	ASN	47	9	56
2	Tenaga Honor	15	5	20
JUMLAH		62	14	76

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 73,68% pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 26,32% berstatus tenaga honor. Sedangkan pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 81,58% dan 18,42% berjenis kelamin perempuan.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, maka pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Dari Jumlah ASN sebanyak 56 (lima puluh enam) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	3
2	Sarjana (S-1 dan D-4)	22
3	Sarjana Muda (D-2 dan D-3)	2
4	SLTA/Sederajat	23
5	SLTP/Sederajat	1
6	SD/Sederajat	5
JUMLAH		56

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 5,36% ASN berpendidikan Strata 2 (S-2), 39,29% berpendidikan Strata 1 (S-1), 3,57% berpendidikan Diploma II dan III (D-II dan D-III), sedangkan berpendidikan SLTA/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SD sebanyak 51,78%.

Tabel 2.3
Data ASN Berdasarkan Jenjang Kepangkatan/Golongan

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		a	b	c	d	
1	Golongan IV	5	-	1	-	6
2	Golongan III	5	4	12	6	27
3	Golongan II	1	2	2	15	20
4	Golongan I	-	1	1	1	3
Jumlah		11	7	16	22	56

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa ASN dengan Golongan IV sebanyak 10,71%, Golongan III sebanyak 48,21%, Golongan II sebanyak 35,71% dan Golongan I sebanyak 5,38%.

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, baik untuk operasionalisasi kegiatan rutin dinas maupun operasional kegiatan lapangan termasuk pelaksanaan kegiatan sektor jasa usaha dalam rangka penerimaan pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1	Ruang kerja	Unit	6
2	AC split	Buah	8
3	Laptop	Buah	25
4	Komputer PC	Buah	1
5	LCD Proyektor	Buah	1
6	Mesin Absensi	Buah	1
7	Meja Biro	Buah	11
8	Kursi Rapat Plastik	Buah	33
9	Printer	Buah	23
10	Soundsystem	Buah	1
11	Mesin Potong rumput	Buah	2
12	Genset	Buah	1
13	Kamera	Buah	9
14	Papan Infromasi	Buah	1
15	Sofa	Buah	1
16	Meja rapat	Set	1
17	Televisi	Buah	1
18	Rak Kayu	Buah	3
19	Lemari Kayu	Buah	10
20	Kursi Putar	Buah	10
21	Harddisk External	Buah	6
22	Pesawat Telepon	Buah	1
23	Handy talky	Buah	1
24	Faximile	Buah	1
25	Wireless	Buah	1
26	Brankas	Buah	1

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran. Ruang kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama. Hasil kajian Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka sebesar 1,40. Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang masih belum memadai.

Tabel 2.5
Data Kendaraan Ringan dan Kendaraan Berat

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	RR	RB
1	Kendaraan roda empat	Unit	1	1	-	-
2	Kendaraan roda dua	Unit	19	19	-	-
3	Alat angkut					
	- Truck tangki air	Unit	1	1	-	-
4	Alat berat					
	- Payloader	Unit	1	1	-	-
	- Excavator	Unit	1	1	-	-
5	Alat Laboratorium dan Alat Ukur					
	- Abrating Machine	Unit	2	2	-	-
	- Alat pemeriksaan beton	Unit	2	2	-	-
	- Slump test	Unit	2	2	-	-
	- Jangka	Unit	2	2	-	-
	- Alat lab bahan bangunan lain-lain	Unit	5	5	-	-
	- Alat lab aspal dan cat kimia lain-lain	Unit	3	3	-	-
	- GPS	Unit	3	3	-	-
	- Timbangan Cepat	Unit	1	1	-	-
	- Alat ukur lainnya	Unit	21	1	-	-

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dapat dilihat dari tabel-tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sikka
Tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik		15 Km		15 km	15 km	15 km	15 km	30 km	17,92 Km	15 km	7,52 km	7,95 km	30 Km	119,47	100,00	50,13	53,00	53,00
	Panjang Jalan Lingkungan		10 Km		10 km	10 km	10 km	10 km	10 km	9,89 km	10 km	6 km	6,378 km	10 Km	98,90	100,00	60,00	63,78	63,78
	Panjang Pembukaan Jalan		0,5 Km		0,5 km	0,5 km	0,5 km	0,5 km	0,5 km	8,9 km	0,5 km	0,2 km	4,5 km	1,5 km	1780,00	100,00	40,00	1100,00	1100,00
2	Jumlah Jembatan Yang Terbangun		1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	1 unit	4 unit	1 Unit	-	3 unit	100,00	400,00	100,00	0,00	100,00
3	Panjang Drainase dan Saluran yang terbangun		1 km		1 km	1 km	1 km	1 km	1,5 km	1,25 Km	0,26 Km	0,50 km	2,84 km	1,5 km	125,00	26,00	50,00	284,00	284,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Panjang Turap Talud Bronjong Yang terbangun		3 Km		3 Km	3 Km	3 Km	3 Km	1 Km	2,23 km	1,09 km	4,289 Km	5,2 Km	1 Km	6,69	36,33	142,97	142,97	142,97
5	Panjang jalan kabupaten yang terpelihara dalam kondisi baik		10 Km		10 Km	10 Km	10 Km	10 Km	10 Km	18,55 km	33 km	13,216 km	5,62 km	6,05 Km	185,50	330,00	132,00	187,33	187,33
6	Cakupan pelayanan air bersih / minum (jaringan)		1,45 %		1,41 %	1,37 %	1,33 %	1,29 %	3,74 %	1,41 %	1,37 %	1,50 %	0,32 %	3,51 %	100,00	100,00	112,78	24,81	24,81
7	Jumlah D.I yang terpelihara		5 DI		5 DI	5 DI	5 DI	5 DI	5 DI	5 DI	6 DI	5 DI	4 DI	5 DI	100,00	120,00	100,00	80,00	80,00
8	Luas Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		100 Ha		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	105,52 Ha	100 Ha	100,00	100,00	100,00	105,52	105,52
9	Jumlah Luas Tanam		100 Ha		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan pelayanan air minum (non Jaringan)		50 %		55 %	60 %	65 %	70 %	73%	52,15 %	52,15 %	65 %	-	67,67	95,47	86,92	100,00	0,00	92,70
11	Cakupan pelayanan air limbah		0,32 %		0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,32 %	0,47 %	0,32%	0,32%	0,32 %	-	0,32%	100,00	100,00	100,00	0,00	67,89 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Panjang Pembangunan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Perkotaan		2,00 Km		2,00 Km	2,00 Km	2,00 Km	2,00 Km		0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Panjang Pembangunan Jalan Lingkungan Pada Kawasan Perdesaan		4 Km		4 Km	4 Km	4 Km	4 Km		2,10 Km	2,10 Km	0,00	-		52,50	52,50	0,00	0,00	0,00
15	Database Infrastruktur yang terbangun		2 Dok		-	-	1 Dok	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-	-	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16	Jumlah regulasi Yang tersusun		1 Perda		-	-	1 Perda	1 Perda	1 Perda	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah kegiatan LC		1 Keg		-	-	1 Keg	1 Keg	1 Keg	-	-	-	-	1 Keg	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18	Jumlah Rekomendasi IMB yang dikeluarkan		150 Rekomendasi IMB		-	-	150 Rekomendasi IMB	150 Rekomendasi IMB	150 Rekomendasi IMB	-	-	150 Rekomendasi IMB	150 Rekomendasi IMB	150 Rekomendasi IMB	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Jumlah sarana Kebinamaragaan yang terpelihara		3 Unit				3 Unit	3 Unit	3 Unit	-	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
20	Jumlah layanan Jasa Konstruksi dan Laboratorium		100%		-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	50,83%	100%	0,00	0,00	100,00	50,83	50,83

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sikka

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.838.954.243	5.557.953.616	3.958.353.068	4.171.115.430	4.422.399.281	4.711.502.539	5.309.368.658	3.333.608.973	3.842.919.996	4.290.844.439	97,37	95,53	84,22	92,13	97,03	8,60	-1,25
B	BELANJA LANGSUNG	81.446.043.041	211.161.965.208	178.419.663.151	90.682.424.593	80.944.129.869	59.192.796.930	174.573.395.318	101.143.077.996	79.695.093.830	74.777.159.152	72,68	82,67	56,69	87,88	92,38	31,26	15,19
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	539.936.282	791.100.188	873.322.942	590.989.450	612.183.550	432.152.295	633.380.702	816.613.278	528.076.902	589.474.036,00	80,04	80,06	93,51	89,35	96,29	-2,49	9,62
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	893.455.600	13.514.882.575	25.220.636.256	18.317.130.111	4.562.817.768	351.628.025	11.741.998.734	16.738.205.459	15.175.204.368	3.633.913.895	39,36	86,88	66,37	82,85	79,64	477,36	2.540,91
III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	38.000.000	11.531.000	38.773.000	67.100.000	0	31.140.800	5.700.000	24.890.000	17.153.640	0,00	81,95	49,43	64,19	25,56	54,34	20,40

1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
IV.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	35.317.222.526	101.319.730.346	85.283.674.889	29.097.522.581	45.126.262.689	26.564.254.602	85.405.349.562	35.409.031.665	26.148.004.250	42.289.995.042	75,22	84,29	41,52	89,86	93,71	37,90	12,19
V.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	1.253.475.491	1.003.102.932	503.930.000	1.868.588.000	3.207.517.638	1.031.804.604	457.871.710	376.619.800	1.528.203.000	2.973.130.079	82,32	45,65	74,74	81,78	92,69	88,11	146,22
VI	Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	2.412.468.000	3.378.246.770	3.217.268.000	2.229.854.536	4.935.542.350	2.393.983.000	3.178.850.058	3.003.545.464	1.889.074.536	4.894.706.540	99,23	94,10	93,36	84,72	99,17	11,69	18,72
VII.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	21.607.242.816	63.965.527.165	23.710.343.005	10.647.704.070	7.895.965.380	16.423.664.806	54.218.617.273	14.590.978.172	9.208.941.973	6.833.212.989	76,01	84,76	61,54	86,49	86,54	47,77	21,87
VIII.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	247.604.260	196.322.000	333.214.000	154.125.000	1.555.653.200	246.498.000	192.935.000	326.297.000	141.770.000	1.551.698.650	99,55	98,27	97,92	91,98	99,75	78,62	88,95
IX.	Program Pengembangan dan pengelolaan Jar. Irigasi Rawa dan Jar.Png Lainnya	11.945.836.991	12.942.825.482	14.931.136.122	10.427.835.588	5.056.771.400	6.451.675.198	10.811.624.402	11.973.533.087	9.507.737.647	4.732.822.836	54,01	83,53	80,19	91,18	93,59	3,01	8,93
X	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	4.474.683.925	7.004.789.500	19.031.394.000	9.208.018.020	3.678.410.586	2.854.685.000	2.711.563.700	13.158.987.338	8.674.678.785	3.263.335.145	63,80	38,71	69,14	94,21	88,72	-12,21	38,36
XI.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2.437.049.920	2.752.467.750	4.584.098.537	7.560.243.437	3.467.817.808	2.296.447.000	2.739.523.077	4.296.064.300	6.538.109.669	3.236.733.800	94,23	99,53	93,72	86,48	93,34	7,10	23,12
XII	Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	148.177.230	130.853.550	0	0	0	8.050.000	61.108.100	0	0	5,43	46,70	0,00	0,00	0,00	-20,28	-186,50	
XIII	Program Perencanaan Tata Ruang	0	0	194.385.450	402.069.500	233.335.250	0	0	184.285.250	246.615.600	221.169.750	0,00	0,00	94,80	61,34	94,79	-21,70	-3,45

1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
XIV	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	0	170.384.150	37.347.300	544.752.250	0	0	135.529.983	31.822.500	539.812.750	0,00	0,00	79,54	85,21	99,09	74,45	93,70
XV	Program Manajemen dan Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan Umum	0	0	0	102.224.000	0	0	0	0	51.964.600	0	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00
XVI	Program Infrastruktur Perdesaan	115.290.000	158.594.950	0	0	0	96.304.400	30.675.000	0	0	0	83,53	19,34	0,00	0,00	0,00	-2,80	-26,60
XVII	Program Lingkungan Sehat Perumahan	720.026.350	112.535.450	0	0	0	556.694.210	102.107.050	0	0	0	77,32	90,73	0,00	0,00	0,00	-34,18	-15,16
XVIII	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	34.806.760	288.955.000	0	0	0	27.844.260	282.702.000	0	0	0	80,00	97,84	0,00	0,00	0,00	181,00	-67,52
XIX	Program Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	0	1.250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.403.878.540	1.475.729.200	0	0	0	1.401.954.440	1.422.823.650	0	0	0	99,86	96,41	0,00	0,00	0,00	-7,41	-25,11
XXI	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	148.351.390	2.850.535.000	354.344.800	0	0	147.861.390	2.487.642.700	127.687.200	0	0	99,67	87,27	36,03	0,00	0,00	451,74	9,42
XXII	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	1.005.084.000	628.149.150	0	0	0	954.057.000	34.123.000	0	0	0	94,92	5,43	0,00	0,00	0,00	22,73	-128,80
XXIII	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	4.478.040.212	1.119.685.428	0	0	0	4.203.252.715	1.118.623.050	0	0	0	93,86	99,91	0,00	0,00	0,00	207,26	-207,09

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa ratio capaian indikator mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 72,68%, tahun 2016 naik sebesar 82,67%, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 56,69% namun pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 87,88% dan terus meningkat pada tahun 2019 sebesar 92,38%. Hal ini karena perubahan nomenklatur dan urusan Perangkat daerah sehingga berpengaruh pada penganggaran masing-masing program dan kegiatan. Sedangkan realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung pada tahun 2015 sebesar 97,37%, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 95,53%, tahun 2017 sebesar 84,22%, tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 92,13% dan tahun 2019 juga mengalami peningkatan sebesar 97,03%. Ratio pertumbuhan Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 8,60% dengan ratio realisasi sebesar -1,25%. Sedangkan Ratio pertumbuhan anggaran belanja langsung sebesar 31,26% dengan ratio realisasi sebesar 15,19%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Terbatasnya kondisi infrastruktur dan tingginya tuntutan akan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik dan optimal adalah dampak ikutan dari laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten sikka, maka ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu.

Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas. Sehingga infrastruktur sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kenyamanan lingkungan.

Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrstruktur adalah menurunnya kinerja infrastruktur, sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur serta masih adanya kemiskinan dan rendahnya ketersediaan lapangan kerja menjadi bagian yang juga harus diperhatikan dalam penyelenggaraan infrastruktur.

Menghadapi tantangan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat menyeluruh dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah.

Selanjutnya tantangan dan peluang pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, diuraikan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas

Adapun tantangan pengembangan pelayanan dinas sebagai berikut :

- Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan Jembatan
- Masih banyak wilayah yang belum tersedia akses jalan dan Jembatan
- Kurangnya Kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung
- Masih banyak Daerah Irigasi yang belum terbangun
- Rendahnya layanan air minum/air bersih
- Masih banyaknya daerah genangan air
- Masih kurangnya layanan sanitasi
- Ketidakesesuaian pemanfaatan ruang
- Masih rendahnya kualitas Sumber daya Penyedia Jasa
- Masih rendahnya kompetensi ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka
- Belum terpenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja
- Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja
- Kurangnya sistem pengendalian internal

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Adapun Peluang pengembangan pelayanan dinas sebagai berikut :

- 1) Adanya regulasi dan SOP yang mendukung pelaksanaan tugas
- 2) Adanya dukungan pemerintah pusat
- 3) Keterpaduan kebijakan antara pusat dan daerah
- 4) Adanya kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan
- 5) Adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, disebutkan lima masalah pokok yaitu (1) Masih Rendahnya Kualitas Hidup Masyarakat Sikka; (2) Masih Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (3) Masih Rendahnya Akses dan Kualitas Layanan Infrastruktur; (4) Kurangnya Tatanan Kehidupan Sosial yang Harmonis dan (5) Belum Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel.

Dari 5 (lima) masalah pokok RPJMD tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam 3 isu strategis/masalah pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yaitu (1) Masih rendahnya Layanan Infrastruktur, (2) Rendahnya kesesuaian tata ruang wilayah, dan (3) Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas PUPR. Untuk akar masalah pertama dan kedua sangat berkaitan erat dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, sedangkan untuk masalah pokok ketiga disebabkan oleh masalah masih rendahnya profesionalitas ASN Dinas PUPR dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik Dinas PUPR. Masalah pokok kedua dengan kedua masalah tersebut berkaitan erat juga dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

Selanjutnya masalah-masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa masalah pokok, masalah dan akar masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

3.1.1. Masih Rendahnya Layanan Infrastruktur

Identifikasi masalah pokok tersebut diatas selanjutnya diuraikan dalam masalah dan akar masalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya kualitas infrastruktur

Indikasi masalah Masih rendahnya kualitas infrastruktur dapat dilihat dari Indikator Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik, Persentase jembatan dalam kondisi baik, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak, Persentase Rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak, Persentase drainase skala kota dalam kondisi baik, Prosentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi dan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibina.

3.1.2. Masih rendahnya kesesuaian tata ruang wilayah

Identifikasi masalah pokok tersebut diatas selanjutnya diuraikan dalam masalah dan akar masalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang

Indikasi masalah Belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang dapat dilihat dari Indikator Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang.

3.1.3. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas PUPR

Identifikasi masalah pokok tersebut diatas selanjutnya diuraikan dalam masalah dan akar masalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya profesionalitas ASN Dinas PUPR

Indikasi masalah Masih rendahnya profesionalitas ASN Dinas PUPR dapat dilihat dari Indikator Indeks Profesionalitas ASN

b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik Dinas PUPR

Indikasi masalah Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik Dinas PUPR dapat dilihat dari Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan publik Dinas PUPR.

Masalah Masih Rendahnya Layanan Infrastruktur, Masih rendahnya kesesuaian tata ruang wilayah dan Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas PUPR disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut :

- a) rendahnya tingkat kemantapan jalan dan jembatan
- b) masih banyak wilayah yang belum tersedia akses Jembatan
- c) kurangnya kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung
- d) rendahnya layanan air minum/air bersih,

- e) masih kurangnya layanan sanitasi
- f) masih banyaknya daerah genangan air
- g) masih rendahnya kualitas Sumber daya Penyedia Jasa.
- h) Masih rendahnya kapasitas sumber daya dan kelembagaan penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultasi
- i) ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- j) belum optimalnya perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- k) Masih rendahnya kompetensi aparatur
- l) Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja

Ringkasan masalah pokok, masalah dan akar masalah tersebut di atas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Misi I : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas			
1	Masih Rendahnya Layanan Infrastruktur	Masih rendahnya kualitas infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kemantapan jalan 2. Masih banyak wilayah yang belum tersedia akses Jembatan 3. Kurangnya Kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung 4. Rendahnya layanan air minum/air bersih 5. Masih kurangnya akses dan layanan sanitasi 6. Masih banyaknya daerah genangan air 7. Masih rendahnya kualitas Sumber daya tenaga kerja konstruksi

			8. Masih rendahnya kapasitas sumber daya dan kelembagaan penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultasi
2	Masih Rendahnya kesesuaian tata ruang wilayah	Belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang	1. Belum optimalnya perencanaan tata ruang 2. Belum optimalnya pemanfaatan ruang 3. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
3	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas PUPR	1. Masih rendahnya profesionalitas ASN Dinas PUPR	1. Masih rendahnya kompetensi aparatur
		2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik Dinas PUPR	1. Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran detail dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dengan visi adalah "**TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023**". Formulasi visi di atas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Pemenuhan Hak-hak Dasar

Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2) **Bahagia**

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenang dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
- 2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka mengambil bagian penting untuk mencapai visi tersebut dengan mengampu misi 1 dan misi 2 dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan Perencanaan, Pengaturan, Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan tugas pembantuan, agar hasil pembangunan sesuai dengan mutu, waktu dan kualitas yang dipersyaratkan. Adapun faktor penghambat dan pendorong terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka terhadap visi dan misi Kabupaten Sikka

Visi : "TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023"				
No	Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas	1. Masih rendahnya kualitas infrastruktur	1. Masih Banyaknya ruas jalan dan jembatan yang belum tertangani 2. Masih kurangnya pemeliharaan jalan dan jembatan	1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam peningkatan infrastruktur pekerjaan umum 2. Adanya regulasi 3. Adanya standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Adanya kemitraan dengan penyedia jasa 5. Dukungan masyarakat
		2. Belum optimalnya pelaksanaan penataan ruang	1. Topografi wilayah yang sulit 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat merelakan lahannya untuk pembangunan jalan	
		3. Kurangnya Kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung	1. Perilaku pemanfaat jaringan irigasi yang tidak bertanggung jawab 2. Kurangnya tenaga teknis irigasi 3. kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung	
		4. Masih banyak Daerah Irigasi yang belum terbangun	1. Masih kurangnya jaringan irigasi yang permanent 2. Masih kurangnya bangunan utama irigasi`	
		5. Rendahnya layanan air minum/air bersih	1. Belum optimalnya pemanfaatan Kapasitas air yang tidak terpakai (Idle Capacity) 2. Kurangnya sumber air baku 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara jaringan air bersih dan fasilitas yang terbangun	

		6. Masih banyaknya daerah genangan air	1. Masih kurangnya saluran drainase dan bangunan turap 2. Masih kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang terbangun	
		7. Masih kurangnya layanan sanitasi	6. Masih kurangnya sarana prasarana dan utilitas dasar sanitasi 7. Masih rendahnya kesadaran Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)	
		8. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB 2. Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang	
		9. Masih rendahnya kualitas Sumber daya Penyedia Jasa	1. Kurangnya pelatihan sumber daya manusia penyedia jasa 2. Kurang optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penyedia jasa	
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Masih rendahnya kompetensi ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka 2. Belum terpenuhi standarisasi sarana dan prasarana kerja. 3. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerja 4. Kurangnya sistem pengendalian internal	1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan serta bimtek bagi ASN di bidang pekerjaan umum 2. Masih kurangnya peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor 3. Kurangnya sosialisasi tentang perundang-undangan yang berlaku	1. Upaya peningkatan kompetensi dengan pendidikan/pelatihan ASN 2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai 3. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistematis dan terjadwal 4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi

Sumber : olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka berkaitan erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Untuk mencapai Visi tersebut maka Misi yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan tujuan dengan masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:

- 1.1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
- 1.2. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
- 1.3. Kapasitas tampung per kapita;
- 1.4. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.

Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja : Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).

3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja :

- 3.1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
- 3.2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.

Tujuan 4 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja :

- 4.1. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
- 4.2. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Tujuan 4 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu :

- 5.1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
- 5.2. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;

- 5.3. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
- 5.4. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
- 5.5. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis;
- 5.6. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di Bidang Sumber Daya Air, Konektivitas, Keciptakarya dan Perumahan.

1. Sumber Daya Air : meliputi 58,5 m³/kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung, 61 Unit Bendungan, 500 Unit Pembangunan Embung, 500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi, 2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi, 50 m³/detik Ketersediaan Air Baku, 2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai.
2. Konektivitas : meliputi 2.500 Km Pembangunan Jalan Tol, 3.000 Km Pembangunan Jalan Baru, 38.328 m Pembangunan Jembatan, 31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass
3. Permukiman : meliputi 100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan, 90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman, 10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh, 100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan, 5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana

Adapun beberapa faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka ditinjau dari Renstra Kementerian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian Sasaran Kementerian PUPR

VISI: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"				
No	Sasaran Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	1. Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan Jembatan	1. Masih Banyaknya ruas jalan dan jembatan yang belum tertangani	1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam peningkatan infrastruktur pekerjaan umum
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	2. Masih banyak wilayah yang belum tersedia akses jalan dan Jembatan	2. Masih kurangnya pemeliharaan jalan dan jembatan	2. Adanya regulasi
3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	3. Kurangnya Kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung	3. kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung	3. Adanya standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan penataan ruang
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan Professional	4. Masih banyak Daerah Irigasi yang belum terbangun	4. Masih kurangnya jaringan irigasi yang permanent	
		5. Rendahnya layanan air minum/air bersih	5. Masih kurangnya bangunan utama irigasi	
		6. Masih banyaknya daerah genangan air	6. Belum optimalnya pemanfaatan Kapasitas air yang tidak terpakai (Idle Capacity)	
		7. Masih kurangnya layanan sanitasi	7. Kurangnya sumber air baku	
		8. Masih rendahnya kualitas Sumber daya Penyedia Jasa	8. Masih kurangnya saluran drainase dan bangunan turap	
5	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR; Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif; Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam		9. Masih kurangnya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang terbangun	
			10. Masih kurangnya sarana prasarana dan utilitas dasar sanitasi	
			11. Rendahnya koordinasi dengan pemerintah pusat	

Penyelenggaraan Infrastruktur; Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR; Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis; Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi			
---	--	--	--

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diselenggarakan dalam rangka mencapai visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Tahun 2019-2023, yaitu : "Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang yang andal dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman, agar terwujud masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis".

Untuk mewujudkan visi diatas maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT mengemban misi sebaga berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya air (SDA), dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air;
2. Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
3. Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
4. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang pekerjaan umum;
5. Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif;
6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang profesional dan memadai;
7. Mengoptimalkan peranan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah (LPJKD) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa;
8. Melakukan penyusunan program, evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah;
9. Meningkatkan keandalan bangunan melalui uji mutu dengan memanfaatkan teknologi sesuai norma, standar, pedoman dan manual;

10. Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan;
11. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur;
16. Meningkatkan cakupan layanan air bersih/air minum dan ketersediaan akses sanitasi yang layak dan sehat;
17. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung, tata bangunan dan lingkungan;
18. Melaksanakan pembinaan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan;
19. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas sektor dalam pemenuhan infrastruktur dasar, kualitas permukiman, SDM serta kualitas data dan informasi teknis.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka tahun 2012-2032 disusun untuk kurun waktu 20 tahun. Pengembangan ruang wilayah Kabupaten Sikka mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sikka adalah untuk "Mewujudkan Kabupaten Sikka sebagai pusat pertumbuhan Berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan".

Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka meliputi rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Untuk mengetahui pemanfaatan terhadap muatan RTRW Kabupaten Sikka dapat dijelaskan melalui profil pemanfaatan ruang kondisi empat tahun pertama pelaksanaan RTRW. Secara garis besar, profil pemanfaatan ruang di Kabupaten Sikka akan dijabarkan dalam tiga jenis yaitu pemanfaatan ruang sebagai perwujudan dari struktur ruang Kabupaten Sikka, Pemanfaatan yang merupakan perwujudan dari pola ruang Kabupaten Sikka dan perwujudan kawasan strategis Kabupaten Sikka. Adapun Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian tujuan dan arah kebijakan RTRW Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Faktor Penghambat dan Pendorong Palayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian tujuan dan arah kebijakan RTRW Kabupaten Sikka

Tujuan : "Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan"				
No	Arah Kebijakan RTRW	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Perwujudan konstelasi pusat kegiatan yang berhirarki, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kemantapan jalan dan Jembatan 2. Masih banyak wilayah yang belum tersedia akses jalan dan Jembatan 3. Kurangnya Kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung 4. Masih banyak Daerah Irigasi yang belum terbangun 5. Rendahnya layanan air minum/air bersih 6. Masih banyaknya daerah genangan air 7. Masih kurangnya layanan sanitasi 8. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang 9. Masih rendahnya kualitas Sumber daya Penyedia Jasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Banyaknya ruas jalan dan jembatan yang belum tertangani 2. Masih kurangnya pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Topografi wilayah yang sulit 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat merelakan lahannya untuk pembangunan jalan 5. kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi dan bendung 6. Masih kurangnya jaringan irigasi yang permanent 7. Masih kurangnya bangunan utama irigasi 8. Belum optimalnya pemanfaatan Kapasitas air yang tidak terpakai (Idle Capacity) 9. Kurangnya sumber air baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam peningkatan infrastruktur pekerjaan umum 2. Adanya regulasi 3. Adanya standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Adanya kemitraan dengan penyedia jasa 5. Dukungan masyarakat 6. Terbentuknya badan koordinasi penataan ruang secara nasional dan provinsi sebagai wahana koordinasi dan konsolidasi penataan ruang secara lokal, regional dan nasional 7. Adanya hasil-hasil kajian,
2	Peningkatan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan pertanian dan pariwisata;			
3	Peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana lainnya untuk mendukung pengembangan			

4	<p>pusat pertumbuhan wilayah; Pelestarian fungsi kawasan lindung diwilayah darat dan laut untuk menjaga keseimbangan flora dan fauna, keseimbangan hidrologis dan keseimbangan cagar budaya, sehingga memperkecil dampak kerusakan lingkungan dan meminimalkan resiko bencana;</p>		<p>10. Masih kurangnya saluran drainase dan bangunan turap 11. Masih kurangnya sarana prasarana dan utilitas dasar sanitasi 12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB 13. Kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang</p>	<p>rekomendasi dan pembinaan dari Nasional dan Provinsi, khususnya dalam kajian perencanaan dan pengendalian ruang</p>
5	<p>Pengoptimalan pengembangan kawasan budidaya darat dan laut sebagai aset wilayah yang pemanfaatan kawasan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan guna mendukung pengembangan pusat pertumbuhan berbasis perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata; dan</p>			
6	<p>Pengoptimalan pengembangan kawasan prioritas berkembang, dan kawasan strategis sebagai pusat</p>			

<p>pertumbuhan baru dengan pengembangan berbasis pada perdagangan jasa, industri pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.</p>			
---	--	--	--

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program. KLHS dalam penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Pasal 3, tujuan pelaksanaan KLHS adalah :

- a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD.
- b. meningkatkan kualitas RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Sikka sebagai mana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka terhadap Pencapaian tujuan dan arah kebijakan KLHS Kabupaten Sikka

<i>Tujuan : "Mewujudkan Kabupaten Sikka Sebagai Pusat Pertumbuhan Berbasis Perdagangan Jasa, Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Pariwisata Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan"</i>					
No	Program yang dikaji	Analisis Permasalahan Berdasarkan KLHS	Faktor		Implikasi terhadap pelayanan perangkat daerah
			Penghambat	Pendorong	
1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Masih kurangnya kajian untuk penyediaan sumber air baku	1. Topografi wilayah yang sulit	1. Dukungan Pemerintah Pusat dalam peningkatan infrastruktur pekerjaan umum	1. Perencanaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan target capaian
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2. Masih kurangnya jaringan air minum/air bersih dan sambungan rumah (SR) 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan limbah cair, Belum adanya kajian dampak timbulan limbah, belum adanya Dokumen Teknis	2. Masih kurangnya jaringan irigasi yang permanent 3. Masih kurangnya bangunan utama irigasi 4. Belum optimalnya pemanfaatan Kapasitas air yang tidak terpakai (Idle Capacity) 5. Kurangnya sumber air baku 6. Masih kurangnya saluran drainase dan	2. Adanya regulasi 3. Adanya program terkait peningkatan layanan air minum/air bersih dan Penyediaan sumber air baku 4. Adanya kerja sama dengan institusi pengelola air tingkat desa dan perkotaan (SPAM, PDAM)	2. Peningkatan jaringan air minum dan Sambungan Rumah 3. Perlu perhatian khusus untuk pengelolaan air minum dan air limbah

		Pengelolaan Sampah, masih banyak saluran drainase yang belum memenuhi standar sehingga tersumbat	7. Masih kurangnya sarana prasarana dan utilitas dasar sanitasi	5. Adanya regulasi terkait limbah dan baku mutu lingkungan serta tata ruang	
--	--	--	---	---	--

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka ada 3 (tiga) rumusan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, yaitu:

- 1) Masih Rendahnya Layanan Infrastruktur;
- 2) Masih Rendahnya kesesuaian tata ruang wilayah;
- 3) Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas PUPR.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka, sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaahan terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur

Tujuan Meningkatnya Layanan Infrastruktur dengan Indikator **Cakupan layanan infrastruktur.**

2. Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah

Tujuan Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah dengan Indikator **Kesesuaian tata ruang wilayah.**

3. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

Tujuan Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dengan indikator **Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka.**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, dimana tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki peran yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas.

Untuk pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur

Sasaran meningkatnya kualitas infrastuktur dengan Indikator **Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik, Persentase jembatan dalam kondisi baik, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak, Persentase Rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak, Persentase drainase skala kota dalam kondisi baik, Prosentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi dan Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibina.**

2. Optimalisasi pelaksanaan penataan ruang

Sasaran Optimalisasi pelaksanaan penataan ruang dengan Indikator **Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang.**

3. Meningkatnya Profesionalitas ASN di bidang pekerjaan umum

Sasaran meningkatnya Profesionalitas ASN di bidang Pekerjaan Umum dengan Indikator **Indeks profesionalitas ASN.**

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan Indikator **Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan publik Dinas PUPR.**

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Cakupan layanan infrastruktur	49,31%	51,20%	51,20%	54,00%	56,48%
			Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	59,58	63,06	65,96	68,87	71,77
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	-	-	-	100,00	100,00
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	48,02	50,72	52,33	54,49	56,64
			Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak	37,54	38,64	46,79	51,40	55,96

			Persentase Rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak	46,90	46,97	47,05	47,13	47,20
			Persentase drainase skala kota dalam kondisi baik	54,54	56,62	58,71	60,79	62,87
			Prosentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi	-	-	35,34	37,34	39,35
			Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibina	-	-	6,01	12,02	18,04
2.	Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah	Optimalisasi pelaksanaan penataan ruang	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	-	-	99,30	99,35	99,40
3.	Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pekerjaan		Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka	Meningkatnya Profesionalitas ASN di bidang Pekerjaan Umum	Indeks profesionalitas ASN	65	68	72	75	78
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan penanganan ruas jalan.

2. Penyediaan akses Jembatan di banyak wilayah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Penyediaan akses Jembatan di banyak wilayah adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan Pembangunan jembatan.

3. Peningkatan Kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bendung, Pembangunan Jaringan Irigasi Permanen dan Pembangunan bangunan utama irigasi.

4. Peningkatan layanan air minum/air bersih

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan layanan air minum/air bersih adalah dengan merumuskan arah kebijakan Optimalisasi pemanfaatan Kapasitas air yang tidak terpakai (Idle Capacity), Peningkatan pembangunan sumber air baku dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM.

5. Peningkatan akses dan layanan sanitasi

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan akses dan layanan sanitasi adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan sarana prasarana dan utilitas sanitasi.

6. Pengurangan Daerah Genangan Air

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Pengurangan Daerah Genangan Air adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan pemeliharaan terhadap saluran drainase dan utilitas yang terbangun.

7. Peningkatan kualitas Sumber daya tenaga kerja konstruksi

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan kualitas Sumber daya tenaga kerja konstruksi adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kerja konstruksi bersertifikasi.

8. Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultasi

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultasi adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan penyedia jasa konstruksi dan konsultasi.

9. Peningkatan perencanaan tata ruang

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan perencanaan tata ruang adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan produk perencanaan tata ruang.

10. Optimalisasi pemanfaatan ruang

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Optimalisasi pemanfaatan ruang adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan koordinasi dan monitoring terhadap pemanfaatan ruang.

11. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan penegakan terhadap ketaatan pemanfaatan ruang.

12. Peningkatan kompetensi aparatur di Dinas PUPR

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan kompetensi aparatur di Dinas PUPR adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan keterampilan dasar, sosial dan mental ASN.

13. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah dengan merumuskan arah kebijakan Peningkatan peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor.

Untuk menerangkan kausalitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

Visi : " TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023"			
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan	Peningkatan penanganan ruas jalan
		Penyediaan akses Jembatan di banyak wilayah	Peningkatan dan Pembangunan Jembatan
		Peningkatan Kemantapan Jaringan Irigasi dan Bendung	1. Peningkatana Pemerliharaan Jaringan Irigasi dan Bendung

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan Jaringan Irigasi Permanen 3. Pembangunan bangunan utama irigasi
		Peningkatan layanan air minum/air bersih	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jaringan dan Bangunan pelengkap Air bersih/air minum 2. Peningkatan perbaikan jaringan dan bangunan pelengkap air bersih yang rusak 3. Peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan
		Peningkatan akses dan layanan sanitasi	Peningkatan sarana prasarana dan utilitas sanitasi
		Pengurangan Daerah Genangan Air	Peningkatan pemeliharaan terhadap saluran drainase dan utilitas yang terbangun
		Peningkatan kualitas Sumber daya tenaga kerja konstruksi	Peningkatan kapasitas sumber daya tenaga kerja konstruksi bersertifikasi
		Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan penyedia jasa konstruksi dan jasa konsultasi	Peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan penyedia jasa konstruksi dan konsultasi

Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah	Optimalisasi pelaksanaan penataan ruang	Peningkatan perencanaan tata ruang	Peningkatan produk perencanaan tata ruang
		Optimalisasi pemanfaatan ruang	Peningkatan koordinasi dan monitoring terhadap pemanfaatan ruang
		Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan penegakan terhadap ketaatan pemanfaatan ruang
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi			
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka	Meningkatnya Profesionalitas ASN di bidang pekerjaan umum	Peningkatkan kompetensi aparatur di Dinas PUPR	Peningkatan ketrampilan dasar, sosial dan mental ASN
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana kerja	Peningkatan peralatan/perlengkapan perabot, interior, dan tata ruang kantor

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas																	
Meningkatnya Layanan Infrastruktur				Cakupan layanan infrastruktur	49,31%	51,20%		51,20%		54,00%		56,48%		56,48%			
	Meningkatnya kualitas infrastruktur			Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	59,58%	63,06%		65,96%		68,87%		71,77%		71,77%		Dinas PUPR	Kab. Sikka
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	-	-		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		Dinas PUPR	Kab. Sikka
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	48,02%	50,72%		52,33%		54,49%		56,64%		56,64%		Dinas PUPR	Kab. Sikka
				Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak	37,54%	38,64%		46,79%		51,40%		55,96%		55,96%		Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Persentase Rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak	46,90%	46,97%		47,05%		47,13%		47,20%		47,20%		Dinas PUPR	Kab. Sikka
				Persentase drainase skala kota dalam kondisi baik	54,54%	56,62%		58,71%		60,79%		62,87%		62,87%		Dinas PUPR	Kab. Sikka
				Prosentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi	-	-		35,34		37,34		39,35		39,35		Dinas PUPR	Kab. Sikka
				Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibina	-	-		-		6,01		12,02		18,04		Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Pengelolaan SDA yang dilaksanakan	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%		Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%		Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersediaanya Dokumen Perencanaan Kegiatan Sumber Daya Air	-	-	0	1 Dok	25.472.000	1 Dok	38.208.000	1 Dok	40.118.400	3 Dok	103.798.400	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.02.2.01.07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang dibangun	-	-	0	9 Unit	12.068.076.750	30 Unit	17.818.425.173	25 Unit	18.133.451.216	64 Unit	48.019.953.139	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	-	-	0	1950 M	597.784.139	2000 M	627.673.346	2500 M	659.057.013	6450 M	1.884.514.498	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	-	-	0	500 M	361.000.017	600 M	397.100.019	500 M	416.955.020	1500 M	1.175.055.055	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	-	-	0	500 M	3.805.490.000	500 M	3.995.764.500	500 M	4.195.552.725	1500 M	11.996.807.225	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah DI yang terpelihara	-	-	0	6 Unit	144.216.000	6 Unit	158.637.600	6 Unit	166.569.480	18 Unit	469.423.080	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Terlaksana Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	-	-	0	50 OH	20.000.000	50 OH	21.000.000	50 OH	22.050.000	150 OH	63.050.000	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang terbangun	-	-	0	18 Paket	46.695.000.000	25 Paket	49.689.025.646	25 Paket	50.351.728.239	68 Paket	146.735.753.885	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang ditingkatkan	-	-	0	2400 M	5.334.962.900	2500 M	5.601.711.045	2750 M	5.881.796.597	7650 M	16.818.470.542	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang ditingkatkan	-	-	0	2750 M	15.472.003.344	3000 M	16.245.603.511	3000 M	17.057.883.687	8750 M	48.775.490.542	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM di Kawasan Perdesaan yang dipelihara	-	-	0	1 Unit	1.250.102.240	1 Unit	1.312.607.352	1 Unit	1.378.237.720	3 Unit	3.940.947.312	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang disediakan	-	-	0	412 Unit	1.760.000.000	450 Unit	1.848.000.000	450 Unit	1.940.400.000	1312 Unit	5.548.400.000	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	0	50 OH	7.987.490	50 OH	8.386.865	50 OH	8.806.208	150 OH	25.180.562	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kot yang dibangun/disediakan	-	-	0	500 Unit	15.678.730.000	750 Unit	22.780.425.313	750 Unit	23.349.726.274	2000 Unit	61.808.881.587	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	-	-	0	50 OH	7.983.400	100 OH	15.966.800	100 OH	16.781.107	250 OH	40.731.307	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	-	-	0	700 M	787.107.100	2100 M	2.125.189.170	2100 M	2.231.448.629	4800 M	5.143.744.899	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase Perkotaan yang direhab	-	-	0	900 M	21.739.300	2000 M	86.957.200	2000 M	91.305.060	4900 M	200.001.560	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	-	-	0	1 Dok	936.428.900	1 Dok	983.250.345	1 Dok	1.032.412.862	3 Dok	2.952.092.107	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	-	-	0	1 Dok	465.594.700	1 Dok	488.874.435	1 Dok	513.318.157	3 Dok	1.467.787.292	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik yang terbangun	-	-	0	48,93 Km	146.903.640.672	15 Km	174.725.892.526	10 Km	178.551.311.513	73,93 Km	500.180.844.711	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara	-	-	0	6,60 Km	10.407.398.479	10 Km	11.968.508.251	7 Km	12.566.933.663	23,6 Km	34.942.840.393	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Terbangun	-	-	0	3 Unit	7.190.000.000	4 Unit	8.268.500.000	3 Unit	8.681.925.000	10 Unit	24.140.425.000	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikasi	-	-	0	30 Org	28.700.000	120 Org	231.159.500	120 Org	223.875.630	270 Org	483.735.130	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi yang teridentifikasi	-	-	0	1 Keg	14.878.900	1 Keg	29.757.800	1 Keg	31.245.690	3 Keg	75.882.390	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan SIPJAKI Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Yang mendapat pelayanan SIPJAKI	-	-	0	1 Keg	15.200.000	1 Keg	30.400.000	1 Keg	31.920.000	3 Keg	77.520.000	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.11.2.02.03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Administrator SIPJAKI yang dilatih	-	-	0	1 Keg	24.941.400	1 Keg	49.882.800	1 Keg	52.376.940	3 Keg	127.201.140	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU yang dilaksanakan	-	-	0	1 Keg	14.818.400	1 Keg	29.636.800	1 Keg	31.118.640	3 Keg	75.573.840	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yg dilaksanakan	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	0	1 Keg	3.000.000	1 Keg	6.000.000	1 Keg	6.300.000	3 Keg	15.300.000	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya kesesuaian tata ruang wilayah	Optimalisasi pelaksanaan penataan ruang			Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	-	-	-	99,35%	-	99,40%	-	99,45%	-	99,45%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Sikka	-	-	0	1 Dok	1.009.141.000	-	0	-	0	1 Dok	1.009.141.000	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Materi Teknis, Naskah Akademis dan Draft Ranperda RDTR dan PZ bwp	-	-	0	1 Dok	1.048.868.700	-	0	-	0	1 Dok	1.048.868.700	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan konsolidasi lahan	-	-	0	1 Keg	277.109.500	2 Keg	554.219.000	1 Keg	581.929.950	4 Keg	1.413.258.450	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Ruang Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	-	-	0	1 Keg	89.095.600	2 Keg	178.191.200	1 Keg	187.100.760	4 Keg	454.387.560	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi penataan Ruang Daerah	-	-	0	1 Keg	57.221.300	1 Keg	114.442.600	1 Keg	120.164.730	3 Keg	291.828.630	Dinas PUPR	Kab. Sikka
Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi																	
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas PUPR	Meningkatkan kinerja profesional ASN di bidang Pekerjaan Umum			Indeks Kualitas pelayanan publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka	65	68	-	72	-	75	-	78	-	78	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPUPR	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang di Bayarkan Gaji dan Tunjangannya	-	-	0	59 Org	4.465.559.952	60 Org	4.688.837.950	60 Org	4.923.279.847	179 Org	14.077.677.749	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan yang dibayarkan	-	-	0	12 Bln	214.664.500	12 Bln	225.397.725	12 Bln	236.667.611	36 Bln	676.729.836	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPKPP	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Yang disediakan	-	-	0	9 Jenis	1.997.400	20 Jenis	3.994.800	20 Jenis	4.594.020	49 Jenis	10.586.220	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	-	0	1 Paket	33.157.300	1 Paket	66.314.600	1 Paket	132.629.200	3 Paket	232.101.100	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan Minum Yang Disediakan	-	-	0	680 OM	7.125.000	700 OM	7.481.250	750 OM	7.855.313	2130 OM	22.461.563	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Dan Jumlah Barang Cetak Dan Pengganda yang disediakan	-	-	0	2 Jenis	12.999.900	5 Jenis	25.999.800	10 Jenis	51.999.600	17 Jenis%	90.999.300	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Biaya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang disediakan	-	-	0	12 Bulan	840.000	12 Bulan	882.000	12 Bulan	926.100	36 Bulan	2.648.100	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	-	-	0	15 Kali	153.780.000	25 Kali	230.670.000	25 Kali	346.005.000	90 Kali	730.455.000	Dinas PUPR	Kab. Sikka
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik			Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan publik Dinas PUPR	1,45	1,50	-	1,55	-	1,60	-	1,65	-	1,65	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, Air, Listrik, dan Telepon	-	-	0	12 Bulan	90.799.509	12 Bulan	95.339.484	12 Bulan	100.106.459	36 Bulan	286.245.452	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honor Kebersihan/ Jenis Dan Jumlah Alat Kebersihan Yang Diadakan	-	-	0	3 Org	71.414.700	3 Org	74.985.435	3 Org	78.734.707	9 Org	225.134.842	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100,00%	-	Dinas PUPR	Kab. Sikka

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Yang dipelihara dan STNK Serta Uji Kir Yang Diurus	-	-	0	21 Unit	189.420.170	25 Unit	198.891.179	25 Unit	208.835.737	71 Unit	597.147.086	Dinas PUPR	Kab. Sikka
		1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	0	2 Unit	4.396.713.500	1 Unit	5.000.000.000	-	0	3 Unit	9.396.713.500	Dinas PUPR	Kab. Sikka

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Kabupaten Sikka.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra Tahun 2019	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Cakupan layanan infrastruktur	%	49,31	51,20	51,52	54,00	56,48	56,48
2.	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam keadaan baik	%	59,58	63,06	65,96	68,87	71,77	71,77
3.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	-	-	100	100	100	100
4.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	48,02	50,72	52,33	54,49	56,64	56,64
5.	Persentase Rumah tangga dengan akses air minum layak	%	37,54%	38,64%	46,79	51,40	55,96	55,96
6.	Persentase Rumah tangga dengan akses air limbah atau sanitasi layak	%	46,90	46,97	47,05	47,13	47,20	47,20

7.	Persentase drainase skala kota dalam kondisi baik	%	54,54	56,62	58,71	60,79	62,87	62,87
8.	Prosentase Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikasi	-	-	-	35,34	37,34	39,35	39,35
9.	Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dibina	-	-	-	6,01	12,02	18,04	18,04
10.	Persentase Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	-	-	-	99,30	99,35	99,40	99,40
11.	Indeks Profesionalitas ASN	-	65,00	68,00	72,00	75,00	78,00	78,00
12.	Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan publik Dinas PUPR	-	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,65

Sumber : Olahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sikka

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka guna mencapai sasaran-sasaran Dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang pasti dan supportif sehingga menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijakan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.